

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara adikuasa dunia, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang sering dijadikan tujuan migrasi oleh migran yang berasal dari berbagai negara di dunia. Perekonomian yang baik nampaknya menjadi salah satu faktor yang menjadikan Amerika Serikat menjadi negara favorit bagi para imigran. Sejak tahun 1871, Amerika Serikat memang telah menduduki posisi tertinggi dalam perekonomian dunia sehingga dikenal sebagai adidaya ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari World Bank, Amerika Serikat masih memimpin di posisi pertama sebagai negara dengan perekonomian tertinggi, yakni dengan nominal *Gross Domestic Product* (GDP) mencapai 20.544 triliun pada tahun 2018 dan diprediksi akan mengalami kenaikan pada tahun 2020. Amerika Serikat kemudian dikenal sebagai negara adidaya ekonomi yang menguasai hampir seperempat ekonomi global.. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa banyak imigran yang memilih untuk datang ke Amerika Serikat dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan meninggalkan keterpurukan di negara asal.

Berdasarkan laporan dari *International Migration 2019*, Amerika Serikat menduduki posisi pertama sebagai negara dengan jumlah penduduk migran internasional terbesar di dunia. Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa ada sebanyak 51 juta migran internasional yang tinggal di Amerika Serikat pada tahun 2019. Jumlah ini sama dengan 19 persen dari total migran internasional dunia. Antara tahun 1990 hingga 2019, Amerika Serikat mengalami peningkatan terbesar

dari jumlah migran internasional dengan penambahan sebanyak 27,4 juta migran internasional antara tahun tersebut. Adapun aktivitas migrasi ke Amerika Serikat sendiri di dominasi oleh negara-negara berpenghasilan rendah. (Nation, 2019)

Amerika Serikat sebelumnya memang dikenal sebagai negara yang sangat terbuka dalam menerima terjadinya aktivitas migrasi, seperti masuknya imigran ke negaranya. Dalam kisaran tahun 1900 hingga 1920, masuk ke Amerika Serikat tanpa izin bukan merupakan sebuah kejahatan. Hal ini dapat terjadi karena saat itu, di Amerika Serikat belum ada kebijakan migrasi yang jelas untuk membatasi keluar masuknya imigran, khususnya imigran dari Meksiko. Keterbukaan Amerika Serikat terhadap imigran kemudian berubah sejak terjadinya krisis ekonomi Amerika pada tahun 1929, sehingga pemerintah Amerika Serikat melakukan pemulangan terhadap ribuan imigran Meksiko. Amerika Serikat juga mulai membatasi diri dari imigran dengan membuat pagar perbatasan, mengeluarkan undang-undang untuk menekan imigran yang melewati perbatasan, serta melakukan patroli di perbatasan selatan, yakni perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Amerika Serikat bahkan mengeluarkan undang-undang yang mengkriminalkan imigran yang masuk melalui jalur tidak resmi seperti halnya masuk melalui perbatasan selatan. (Worldstir, 2020)

Untuk diketahui bersama bahwa perbatasan selatan merupakan perbatasan langsung antara Amerika Serikat dan Meksiko yang kini menjadi lokasi favorit bagi para imigran untuk masuk ke Amerika Serikat. Setiap harinya, ada banyak para pencari suaka maupun imigran lainnya yang datang ke perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko ini. Sejarah baiknya hubungan antara Amerika Serikat dan Meksiko membuat imigran dari Meksiko pernah mendominasi jumlah

imigran di Amerika Serikat sekaligus mendominasi jumlah imigran ilegal yang mencoba untuk masuk secara tidak resmi melalui perbatasan. Namun seiring berjalannya waktu, imigran dari Meksiko yang masuk melalui perbatasan Selatan secara ilegal mengalami penurunan. Adapun imigran ilegal yang telah masuk dan mencoba untuk masuk melalui perbatasan kemudian di dominasi oleh negara-negara di Amerika Tengah.

Pada tahun 2017 tepatnya pada masa pemerintahan presiden Donald Trump, sebagian besar imigran tidak berdokumen yang masuk ke Amerika Serikat melalui perbatasan selatan berasal dari Amerika Tengah, terutama dari tiga negara yakni Guatemala, Honduras dan El Salvador atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Northern Triangle Countries* atau Negara Segitiga Utara. Sebutan ini diberikan karena ketiga negara tersebut merupakan negara Amerika Tengah yang berada di paling utara. Jumlah imigran ilegal dari Negara Segitiga Utara di perbatasan selatan pun mengalami peningkatan di tahun 2018. Adapun imigran Amerika Tengah ini memilih untuk masuk ke Amerika Serikat karena dilatarbelakangi oleh berbagai alasan.

Kedatangan para imigran asal Amerika Tengah melalui perbatasan selatan nampaknya menjadi masalah yang serius bagi Amerika Serikat. Pasalnya, meskipun telah berkoordinasi dengan otoritas Meksiko sebagai negara transit dalam mengawasi masuknya imigran, namun masih banyak imigran ilegal yang mencoba untuk masuk melalui perbatasan selatan. Hal ini kemudian dianggap membuat kawasan perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko menjadi kawasan yang semakin heterogen, di mana terdapat berbagai macam kelompok masyarakat dengan berbagai macam latar belakang.

Besarnya permasalahan imigran Amerika Tengah yang masuk melalui perbatasan selatan ini memang menjadi perhatian pemimpin Amerika Serikat di setiap masa pemerintahan. Namun, perhatian yang sangat besar mengenai imigran ilegal dari perbatasan selatan ini terjadi pada masa pemerintahan presiden Donald Trump. Adapun Donald Trump mulai menyatakan keprihatinannya terhadap masalah imigran ilegal dari perbatasan selatan ini sejak masa kampanye. Setelah terpilih menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, Trump menjadi presiden yang membawa janji untuk membuat “Amerika Hebat Kembali” atau “*Make America Great Again*” dengan mengatasi berbagai permasalahan imigran ilegal. Trump pun mengeluarkan beberapa kebijakan yang dianggapnya efektif untuk mengatasi permasalahan imigran ilegal, khususnya yang masuk melalui perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko.

Setelah menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif “*Border Security and Immigration Enforcement Improvement*” yang utamanya berisikan perintah mengamankan perbatasan selatan dengan pembangunan dinding di sepanjang perbatasan. Dalam mewujudkan konstruksi tembok perbatasan selatan yang sesuai dengan keinginannya, Trump menghadapi hambatan terkait pendanaan. Trump menginginkan dana pembangunan tembok perbatasan sebesar US\$5,7 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan dari pihak oposisi, partai Demokrat di kongres. Hal ini kemudian berakhir dengan *Government Shutdown* selama 35 hari, yakni penutupan layanan pemerintahan yang disebabkan oleh kegagalan Kongres untuk menyetujui anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahan. (Hidriyah, 2018)

Pada April 2018 bersamaan dengan terus berjalannya kebijakan pembangunan tembok dan usaha Trump untuk memperjuangkan pendanaan tembok perbatasan, Trump mengeluarkan kebijakan *Zero Tolerance* atau kebijakan Nol Toleransi. Secara umum, kebijakan *Zero Tolerance* adalah kebijakan untuk menuntut secara pidana siapapun yang melintasi perbatasan secara ilegal, serta melakukan pemisahan anak-anak imigran ilegal dengan orang tua mereka. Secara keseluruhan, kebijakan *Zero Tolerance* memunculkan pertentangan dari publik Amerika Serikat dan masyarakat internasional lainnya. Kebijakan *Zero Tolerance* ini dianggap sebagai tindakan yang menciderai Hak Asasi Manusia karena adanya tindakan pemisahan keluarga atau *family separation* yang dilihat sebagai tindakan kekerasan psikologis yang disengaja bagi keluarga imigran.

Meskipun merupakan kebijakan yang kontroversial dengan adanya pertentangan besar-besaran dari publik, Administrasi Trump mengklaim bahwa kebijakan *Zero Tolerance* ini akan bertindak sebagai pencegah untuk masuknya imigran ilegal ke Amerika Serikat. Dengan adanya pemisahan anak-anak imigran orang tua mereka, diharapkan bahwa para imigran ini akan menjadi ragu-ragu untuk memasuki Amerika Serikat karena akan mengalami perpisahan dengan anak-anak mereka, sehingga kebijakan *Zero Tolerance* tetap diberlakukan secara resmi di seluruh perbatasan selatan Amerika Serikat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana Trump bisa menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* yang kontroversial untuk menanggulangi persoalan imigran di Amerika Serikat?”

C. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan alat analisis yang berupa teori sekuritisasi.

1. Teori Sekuritisasi

Dalam perkembangannya, salah satu teori yang muncul di dalam ruang lingkup studi keamanan yakni teori sekuritisasi. Teori sekuritisasi atau *securitization theory* merupakan hasil pemikiran dari ilmuwan-ilmuwan di bidang keamanan yang tergabung di dalam *Copenhagen Peace Research Institute* atau dapat juga dikenal dengan Mazhab Copenhagen. Di tahun 1980 an dan dalam paruh pertama tahun 1990 an, *Copenhagen School* telah memberikan kontribusinya dalam debat mengenai keamanan dengan kerangka kerja yang lebih baik yakni mencakup konsep-konsep keamanan dan ancaman keamanan. (Filimon, 2016) Adapun tokoh-tokoh penting dalam Mazhab Copenhagen yang diketahui berkontribusi dalam pencetus dan pengembangan teori sekuritisasi antara lain yakni Barry Buzan, Jaap de Wilde dan Ole Waever.

Copenhagen School melakukan perluasan terhadap dimensi keamanan juga *referent object* (benda atau objek yang diamankan). Adapun terdapat 5 sektor yang menjadi hasil dari perluasan dimensi keamanan internasional yang antara lain yakni keamanan militer, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Sementara untuk *referent object* (benda atau objek yang diamankan) oleh *Copenhagen*

School merujuk pada negara dan masyarakat yang dianggap terancam dan perlu untuk diamankan. (Sudagung, Amanda & Dewi, 2017)

Berangkat dari adanya perluasan isu keamanan di atas, Barry Buzan, Jaap de Wilde dan Ole Waever mengatakan bahwa sekuritisasi merupakan langkah yang dilakukan dengan melampaui aturan main secara umum dalam membingkai sebuah isu, apakah isu tersebut termasuk ke dalam ranah politik atau justru melampauinya. Secara singkat, sekuritisasi merupakan sebuah proses untuk melakukan politisasi terhadap sebuah isu atau menjadikan suatu isu sebagai sebuah permasalahan serius. Adapun isu-isu tersebut biasanya merupakan isu keamanan non-tradisional (non-militer).

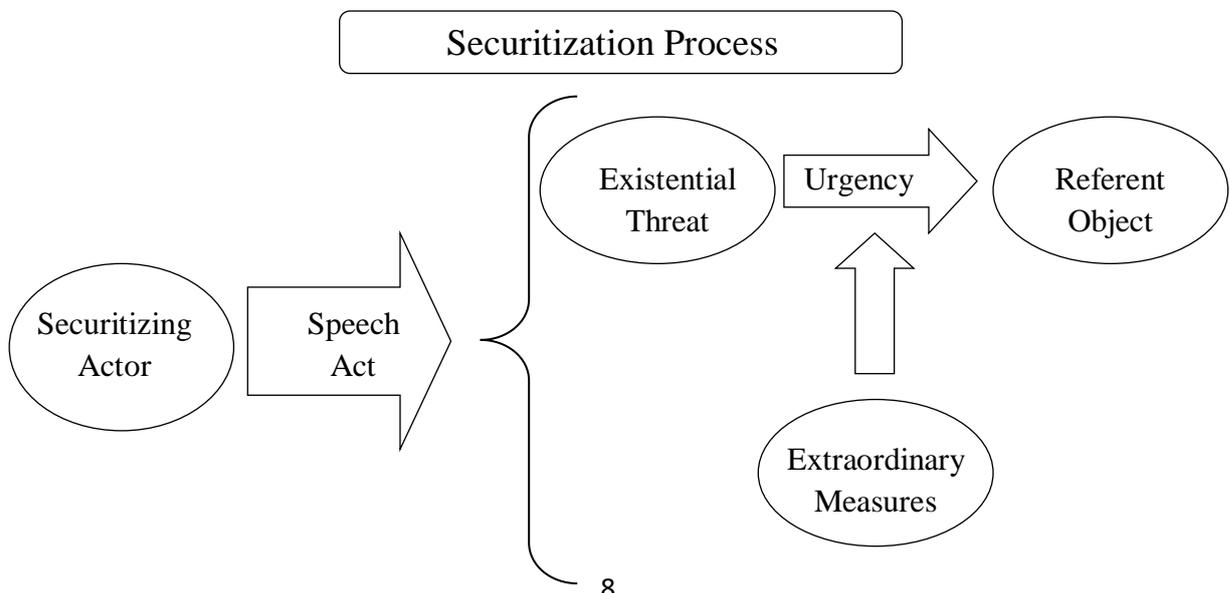
Lebih lanjut lagi, Ole Weaver dalam buku *On Security* menyatakan bahwa sekuritisasi merupakan sebuah deklarasi atau *speech act* yang berguna dalam memahami sifat keamanan yang dibangun. *Speech act* sendiri dapat diartikan sebagai proses untuk menyampaikan sebuah isu atau wacana. Di dalam proses sekuritisasi, sebuah isu dapat dikatakan sebagai sebuah ancaman jika aktor sekuritisasi (*securitizing actor*) telah menyatakannya dengan melalui tindakan *speech act* seperti pidato, demonstrasi atau publikasi. Dalam prosesnya untuk melakukan sekuritisasi, *securitizing actor* melalui *speech act* nya akan menyatakan bahwa sebuah isu yang dianggap tidak berbahaya sebagai sebuah ancaman (*existential threats*) bagi *referent object*. Selanjutnya, *target audience* yakni publik akan menerima isu yang diangkat dalam *speech act* sebagai sebuah ancaman, sehingga perlu untuk diambil tindakan. Akhirnya *securitizing actor* akan melakukan sebuah tindakan darurat atau tindakan luar biasa dan cepat (*extra-*

ordinary measuring) berupa kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan atau melindungi *referent object* dari *existential threats*. (Pratiwi, 2018)

Sampai di sini, kita bisa melihat bahwa di dalam teori sekuritisasi oleh *Copenhagen School*, terdapat logika konstruktivis. Keamanan di dalam *Copenhagen School* terlihat sebagai fenomena yang dikonstruksi secara sosial. (Romaniuk, 2018) Dengan melakukan *speech act*, seorang *securitizing actor* melakukan sebuah usaha untuk mengkonstruksi pemikiran *target audience* untuk melihat isu yang diangkat sebagai sebuah ancaman, sehingga *securitizing actor* dapat melakukan tindakan sekuritisasi. Dengan kata lain, keberhasilan sekuritisasi juga sangat ditentukan oleh kemampuan *securitizing actor* untuk mengkonstruksi pikiran *target audience*, dengan penggunaan bahasa yang tepat serta kemampuan untuk menjelaskan bahwa *referent object* sedang dihadapkan dengan ancaman yang jika tidak ditangani dengan benar akan berakibat fatal.

Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan proses sekuritisasi, kita bisa melihat bagan proses sekuritisasi yang diilustrasikan oleh Özcan (2013) di bawah ini.

Gambar 1.1:
Bagan Proses Sekuritisasi



Sumber: Sezer Özcan, “*Securitization of Energy Through The Lenses of Copenhagen School*”, *The 2013 WEI International Academic Conference Proceedings*, 2013, hal 9

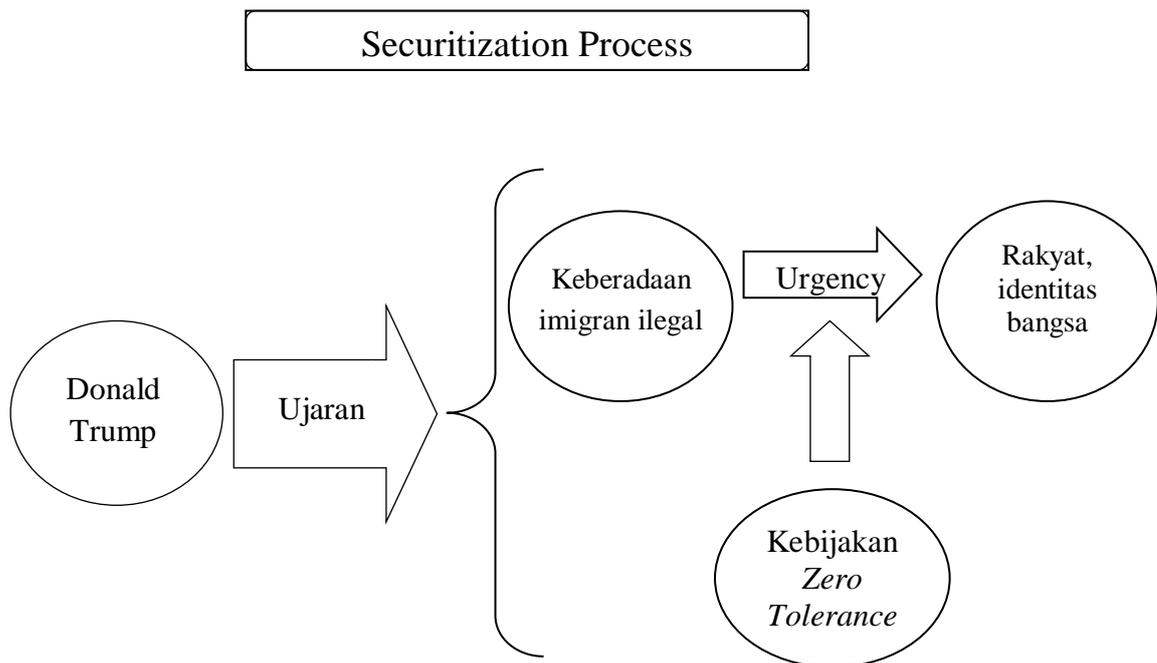
Yang terakhir, di dalam proses sekuritisasi dan penerapan suatu kebijakan terkait keamanan, terdapat peranan dari *functional actor*. *Functional actor* merupakan aktor atau pelaku yang dapat menentukan perkembangan proses sekuritisasi di dalam bidang atau sektor tertentu. *Functional actor* juga memiliki pengaruh di dalam pembuatan suatu keputusan dalam bidang keamanan. Di dalam proses sekuritisasi, *functional actor* tidak berperan sebagai *securitizing actor* dan tidak juga menempatkan dirinya sebagai *referent object* yang perlu untuk diamankan. (Buzan, Weaver & de Wilde, 1998)

Untuk diketahui bersama bahwa keberhasilan proses sekuritisasi pada dasarnya ditentukan oleh respon dari *target audience* terhadap tindakan yang dilakukan untuk melindungi *referent object*. Jika *target audience* dapat menerima isu kemanan dalam yang telah dibingkai dalam *speech act* dan mendukung tindakan yang dilakukan oleh *securitizing actor*, maka proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil. Namun jika tidak, maka isu yang berusaha untuk dibingkai melalui *speech act* hanya akan mencapai tingkatan di politisasi.

Dengan berdasarkan kepada pemaparan teori di atas, maka kita bisa menganalisa bagaimana pemerintahan Trump bisa menerapkan kebijakan *Zero Tolerance*. Sebelum mulai menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* ini, Donald Trump memang memiliki perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan imigran ilegal asal Amerika Tengah yang masuk melalui perbatasan Selatan, sehingga menganggap isu migrasi yakni hadirnya imigran ilegal sebagai ancaman

bagi keamanan Amerika Serikat. Sebelum dapat menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* kita bisa menganalisa proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Trump sebagai berikut.

Gambar 1.2
Bagan Pengaplikasian Teori



Awalnya, pemimpin Amerika Serikat dalam hal ini presiden Donald Trump selaku *securitizing actor* melakukan *speech act* yang berupa ujaran langsung melalui pidato, serta ujaran melalui sosial media dalam akun Twitter resminya @realDonaldTrump. Sementara itu, *target audience* dari *speech act* yang dilakukan oleh Donald Trump adalah publik, yakni seluruh rakyat Amerika Serikat. Dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang menjadi target, maka Trump diharapkan akan mendapatkan dukungan atas *speech act* nya.

Dalam *speech act* nya, ancaman eksistensi atau *existential threats* dalam fenomena masuknya imigran ilegal melalui perbatasan selatan adalah ancaman

yang dianggap membahayakan *referent object* yakni rakyat dan identitas bangsa Amerika Serikat. Adapun ancaman tersebut antara lain yakni imigran ilegal yang dianggap menyebabkan berbagai tindakan kriminal, imigran ilegal dianggap mengambil alih lapangan pekerjaan serta kehadiran imigran ilegal asal Amerika Tengah yang dikhawatirkan tidak dapat berasimilasi, sehingga *referent object* perlu dilindungi dengan mengupayakan cara untuk menanggulangi kehadiran imigran ilegal Amerika Tengah. (Sudagung, Amanda & Dewi, 2017)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa respon dari *target audience* terhadap isu yang dibingkailah yang menentukan keberhasilan proses sekuritisasi. Adapun dalam kasus ini, *speech act* yang dilakukan nampaknya telah berhasil menciptakan kepercayaan publik akan perubahan imigrasi yang lebih baik, sehingga proses sekuritisasi yang dilakukan Trump dapat dikatakan berhasil.

Di dalam upaya penerapan kebijakan *Zero Tolerance* ini, tentu terdapat pula dukungan dari *functional actor*. Adapun yang berperan sebagai pihak yang memiliki pengaruh dalam penerapan kebijakan *Zero Tolerance* dengan mendukung dan mempromosikan *speech act* dari Trump selaku *securitizing actor* yakni media dan kelompok anti-imigran atau *think tank* seperti FAIR (*Federation for Immigration Reform*), CIS (*Center for Immigration Studies*), NumberUSA

D. Hipotesa

Berdasarkan kepada latar belakang dan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan hipotesa atau dugaan sementara yakni:

Trump bisa menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* yang kontroversial untuk menanggulangi persoalan imigran di Amerika Serikat melalui upaya sekuritisasi

dengan melakukan *speech act* yang mendapat dukungan dari aktivis anti-imigran dan media.

E. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul “Sekuritisasi Isu Imigran Sebagai Upaya Penerapan Kebijakan *Zero Tolerance* pada Masa Pemerintahan Donald Trump” ini, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

Mengetahui bagaimana Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump melakukan praktek sekuritisasi sebagai upaya menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* untuk menanggulangi imigran ilegal asal Amerika Tengah.

Kajian Literatur

Karl-Gerhard Lille (2018) dalam tulisannya yang berjudul “*Securitization of Immigration under the Trump Administration: Reconceptualizing the Functional Actor through the Judiciary and the Media*”. Dengan menggunakan kerangka teori yang antara lain konsep inti sekuritisasi, desekuritisasi dan model tiga aliran oleh John Kingdon, Lille menerapkan model sekuritisasi ke dalam empat kategori kebijakan imigrasi Trump yakni 1) mengamankan perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, 2) *travel ban*, 3) pembatasan pengungsi dan imigran serta peningkatan deportasi dan penahanan, 4) melakukan pemotongan anggaran terhadap *sanctuary cities*. Setiap kategori disajikan melalui model tiga aliran oleh Kingdon yang diikuti dengan gambaran umum gerakan sekuritisasi, gerakan desekuritisasi, *framing* oleh media dan proses peradilan. Tulisan ini membuktikan bahwa media dan peradilan sebagai aktor fungsional dalam sekuritisasi dapat

dibenarkan. Diungkapkan juga kekurangan model Kingdon karena anggapannya tentang linieritas temporal ternyata tidak dapat dibenarkan.

Selanjutnya, Batuhan Arslan (2019) dalam tulisannya yang berjudul “*The Securitization of Latin American Immigrants in The USA: A Comparative Case Study of Obama and Trump Administration*” menjelaskan terkait pengaruh kebijakan dan wacana Trump tentang imigrasi terhadap pandangan masyarakat Amerika. Dengan menggunakan kerangka teori yang antara lain sekuritisasi, konsep keamanan, desekuritisasi, sekuritisasi migrasi, serta kritik terhadap *Copenhagen School*, Arslan menjelaskan perubahan pandangan terkait imigrasi dengan menjelaskan pula kebijakan dan wacana imigrasi Barack Obama sebagai presiden AS sebelumnya yang kemudian dikaji sebagai dasar studi kasus komparatif dengan Pemerintahan Trump. Tulisan ini membuktikan bahwa era kepresidenan Obama dan Trump mencerminkan persepsi dan kebijakan yang berbeda. Obama menampilkan imigran sebagai bagian dari kehidupan daripada ancaman keamanan, sementara Trump hampir membatalkan segala sesuatu yang ditetapkan selama kepresidenan Obama.

Yang terakhir, dalam jurnalnya yang berjudul “*The United States’ Zero Tolerance Immigration Policy: An Analysis of Structural Violence*”, Dewi & Cahyani (2018) telah menjelaskan kebijakan *Zero Tolerance* sebagai kebijakan yang digunakan dalam upaya untuk mengurangi jumlah imigran ilegal yang memasuki Amerika Serikat. Dengan menggunakan konsep Kekerasan Struktural oleh Johan Galtung, dibuktikan bahwa terdapat kekerasan struktural dalam penerapan kebijakan *Zero Tolerance* pada masa pemerintahan Donald Trump,

terdapat faktor pendorong yang menyebabkan kekerasan, serta dijalankannya kebijakan *Zero Tolerance* dengan pendekatan *reward* dan *punishment*.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, peneliti dalam penelitian ini akan menganalisa tentang sekuritisasi imigrasi sebagai upaya penerapan kebijakan *Zero Tolerance* pada masa pemerintahan Donald Trump. Dengan menggunakan teori Sekuritisasi oleh *Copenhagen School*, peneliti akan menganalisa bagaimana pemerintahan Trump menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* sebagai upaya untuk menanggulangi imigran ilegal melalui praktek sekuritisasi. Akan dijelaskan pula bagaimana respon publik terhadap proses sekuritisasi yang dilakukan, di mana hal ini akan menentukan berhasil atau tidaknya proses sekuritisasi yang dilakukan.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada era sebelum kepemimpinan presiden Donald Trump, tepatnya pada masa kampanyenya sebagai kandidat presiden Amerika Serikat yakni tahun 2015, serta pada era kepemimpinan Donald Trump di Amerika Serikat. Adapun rentang waktunya yakni tahun 2016 ketika Trump mulai menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, hingga tahun 2018. Batasan waktu diberikan karena dalam rentang waktu tersebut, Trump mulai memberikan perhatian terhadap permasalahan imigran ilegal di Amerika Serikat, hingga akhirnya merasa terancam dengan keberadaan imigran ilegal. Dalam penelitian ini, tidak bisa dipungkiri bahwa peneliti juga akan menggunakan sumber atau data yang berada di luar jangkauan penelitian. Namun, sumber atau data ini hanya akan dipergunakan sebagai bahan perbandingan, referensi dan catatan saja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang berdasarkan kepada data-data yang dikaji atas dasar realita data yang diperoleh dan tentunya dipaparkan secara deskriptif. Dikutip dari Rahmat (2009), Strauss dan Corbin dalam Creswell, J menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan melalui (menggunakan) prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Penelitian kualitatif cenderung digunakan untuk menemukan atau memahami hal-hal tersembunyi dibalik fenomena yang terkadang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Ardianto (2010) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai teknik atau cara bagaimana data itu ditemukan, digali, dikumpulkan, dikategorikan dan dianalisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang telah dikumpulkan atau disusun sebelumnya, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan data sekunder, pengumpulan data untuk penelitian ini di ambil dari dokumentasi dan studi kepustakaan dari buku, jurnal penelitian, penelitian terdahulu, literatur, dokumen, artikel, serta berita-berita yang dimuat di berbagai media seperti koran, media elektronik atau internet yang tentunya relevan atau memiliki keterkaitan dengan penelitian yang di susun.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Dengan menggunakan analisis deskriptif, seluruh data yang diperoleh akan dideskriptifkan secara menyeluruh. Selanjutnya, akan dilakukan penelaahan dan analisis secara mendalam terhadap fakta-fakta dan data-data yang kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

BAB I

Bab I dalam penelitian ini merupakan pendahuluan. Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, tujuan dan manfaat penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab II dalam penelitian ini merupakan bagian pemaparan tentang dinamika permasalahan imigran ilegal di perbatasan selatan Amerika Serikat dan dinamika kebijakan Amerika Serikat. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana perbatasan selatan Amerika Serikat menjadi jalur bagi masuknya imigran ilegal asal Amerika Tengah, serta apa yang melatarbelakangi para imigran untuk masuk ke Amerika Serikat.

BAB III

Bab III dalam penelitian ini merupakan bagian pemaparan tentang pembuktian hipotesa. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang sekuritisasi imigran sebagai upaya penerapan *Zero Tolerance* pada masa pemerintahan Trump. Bagian

ini berisikan speech act yang dilakukan Trump, serta peranan *functional actor* dalam proses sekuritisasi.

BAB IV

Bab IV dalam penelitian merupakan penutup yang terdiri kesimpulan. Pada bab ini, akan dibahas kesimpulan yang diperoleh atau ditarik dari hasil pembahasan dan analisis data yang terdapat di dalam keseluruhan penelitian ini.